KEMENTERIAN HUKUM **KANTOR WILAYAH SULAWESI TENGAH** **BAGIAN TATA USAHA DAN UMUM**	**NOMOR SOP**	W.24-OT.02.02-993
	TANGGAL PEMBUATAN	23 Januari 2026
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL EFEKTIF	02 Februari 2026
	DISAHKAN OLEH	**KEPALA KANTOR WILAYAH** **RAKHMAT RENALDY**
	NAMA SOP	**PENUNJUKAN PENGHUNIAN RUMAH NEGARA**

DASAR HUKUM:	**KUALIFIKASI PELAKSANA:**
1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara; 4. Peraturan Menteri Keuangan No.181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan BMN; 5. Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Hukum Nomor M.HH-23.OT.02.02 Tahun 2024.	1. Mengetahui tugas dan fungsi Sistem dan prosedur Administrasi Pemerintahan; 2. Mengetahui dan memahami aplikasi e-monev.
KETERKAITAN:	**PERALATAN/PERLENGKAPAN:**
1. SOP Penunjukan Penghunian Rumah Negara	1. Komputer/Printer/Scanner; 2. Jaringan Internet; 3. Disposisi; 4. Jaringan Telekomunikasi.
PERINGATAN:	**PENCATATAN DAN PENDAFTARAN:**
Jika SOP tidak dilaksanakan surat izin penghunian rumah negara tidak dapat diterbitkan.	Disimpan sebagai data elektronik dan manual jika suatu saat diperlukan kembali.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

Lampiran
SOP Nomor : W.24-OT.02.02-993
Tanggal : 23 Januari 2026

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENUNJUKKAN PENGHUNIAN RUMAH NEGARA

NO	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			KET
		Staf	Ka Sub Bag Umum & Keuangan	KPB	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	
1	Menghimpun data-data BMN berupa rumah negara				Data referensi, data pegawai, NJOP, data rumah negara, SIP yang lama jika ada	1 x 24 jam	Terhimpunnya data-data sumber	
2	Menghitung besaran uang sewa rumah negara per bulan				Data-data sumber		Besaran uang sewa per bulan	
3	Membuat konsep Surat zin dan ketentuan penghunian rumah negara				Data-data sumber		Konsep surat izin dan ketentuan penghunian rumah negara	
4	Menyerahkan konsep surat izin penghunian dan ketentuan penghunian rumah negara untuk di koreksi				Konsep surat izin dan ketentuan penghunian rumah negara		Diserahkannya konsep surat izin dan ketentuan penghunian rumah negara	
5	Mengoreksi surat izin penghuni dan ketentuan penghuni rumah negara				Konsep surat izin dan ketentuan penghunian rumah negara		Konsep surat izin dan ketentuan penghunian rumah negara telah dikoreksi	
6	Menyerahkan surat izin penghuni rumah negara yang telah di koreksi untuk ditandatangani oleh KPB				Konsep surat izin dan ketentuan penghunian rumah negara yang telah dikoreksi		Diserahkannya konsep surat izin dan ketentuan penghunian rumah negara yang telah dikoreksi	
7	Menandatangani surat izin penghunian rumah negara				Konsep surat izin dan ketentuan penghunian rumah negara yang telah dikoreksi		Surat izin dan ketentuan penghunian rumah negara	
8	Menyerahkan surat izin penghunian dan ketentuan penghunian rumah negara kepada yang bersangkutan beserta kunci rumah negara				Surat izin dan ketentuan penghunian rumah negara		Diserahkannya surat izin dan ketentuan penghunian rumah negara serta kunci rumah negara	

KEPALA KANTOR WILAYAH

Rakhmat Renaldy

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi